

KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK PRAKTIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT

Eko Setiawan

(Alumnus Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Brawijaya Malang)

Post-reformation many kiai plunge into the world of practical politics. The scholars who had been consistently protect the public and a representative of the people's hearts too busy to get into the world of practical politics. So scholars who goes into the bureaucracy, practical time, thought and energy is spent on taking care of practical and complex managerial problems that will gradually forget its main task as a religious expert. Involvement kiai into the realm of practical politics can be regarded as an accident of history. Because such an impressive decision over a betrayal of nature kiai. Kiai into the phenomenon of politicians as is now happening, it erodes the value of fresh charisma and blunt the kiai in power and the public eye.

Keywords: Kiai, Practical Politics, Society

Pendahuluan

Pasantren dan kiai adalah dunia yang tidak habis-habisnya untuk di pelajari dan digali. Ada cakupan banyak penelitian dan kajian dengan menjadikan pesantren dan kiai sebagai objek kajiannya. Namun demikian, selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum terungkap. Hal ini menunjukkan betapa pesantren dan kiai merupakam khazanah yang kaya dengan beragam perspektif. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar jika penelitian demi penelitian telah dilakukan, tetapi selalu saja terdapat perspektif yang dapat diteliti lebih lanjut.

Pondok pesantren sebagai lembaga yang ada dan hidup ditengah masyarakat sampai saat ini masih tetap mampu menghidupi dirinya tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah. Pondok pesantren yang memiliki pengelolaan tradisional, baik dalam proses belajar mengajarnya maupun manajemen kelembagaannya masih terpusat pada keberadaan figur seorang kiai. Keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan yang ada di dalam masyarakat mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan dan ketrampilan teknis, tetapi jauh lebih penting adalah menerapkan nilai moral dan agama.

Keberadaan kiai didalam pondok pesantren sangat penting. Pentingnya seorang kiai dalam pondok pesantren dapat dilihat dari berbagai fungsi dan perannya. Kiai seringkali berada pada posisi sebagai perintis, pendiri, pengelola, dan sekaligus sebagai pengajar. Bahkan terkadang kiai adalah pemilik tunggal sebuah pondok pesantren (Bonawi, 1993:90).

Selain sebagai figur yang memiliki pengetahuan keagamaan sebagai teladan masyarakat, kiai juga mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukan mereka sebagai orang yang terdidik dan mempunyai kharismatik. Kiai dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pesantren. Selain sosok yang kharismatik, apapun yang diajarkan oleh seorang kiai dipandang sebagai kebenaran mutlak yang tidak bisa "diganggu gugat".

Dalam kehidupan pesantren, sikap *tawadlu'* antara santri dan kiai sangat kental sekali. Umumnya para santri berpendapat bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui *berkah* kiai. Salah satu cara untuk memperoleh "*berkah*" kiai, adalah menghormati kiai tersebut. Kadang-kadang sampai sisa air minum kiai saja dijadikan rebutan oleh para santri demi mendapat berkah dari kiai tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, kiai yang semula hanya seorang pengelola pesantren dan pendidik para santri, menurut Endang Turmudi, kiai dapat dibedakan menjadi empat kategori sesuai dengan aktivitasnya. Yaitu, kiai pesantren, kiai tarekat, kiai panggung, dan kiai politik (Muhtarom, 2005:265)

Dalam proses belajar mengajar antara kiai dan santri, mungkin dari ketiga kategori kiai yang pertama yaitu kiai pesantren, kiai tarekat dan kiai panggung tidak akan membawa pengaruh yang signifikan. Namun bagaimana dengan kiai pesantren yang sekaligus terjun dalam politik praktis?

Bukan rahasia lagi, setelah Reformasi bergulir tidak sedikit kiai yang tadinya hidup bertapa, khusyuk, damai dan tenteram dalam pondok pesantren menjadi sebuah haluan, menyebrangi dunia baru yang bernama politik praktis. Akibatnya muncul kabar angin yang menyeruak ke ruang publik bahwa beberapa kiai telah menggunakan agama sebagai kendaraan untuk main-main dengan kekuasaan dan mengegolkan kepentingan dirinya. Tentu saja kabar yang tidak seluruhnya benar dan dibesar-besarkan tersebut sangat merugikan para kiai dan membuat prihatin umat Islam (Sutarto, 2008:1).

Di kalangan umat Islam, kiai adalah salah satu entitas elit yang mempunyai kedudukan terhormat, karena di anggap sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas, mendalam dan makhluk linuwih. Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris Nabi sehingga kiai menjadi sumber legitimasi baik dalam domain agama maupun sosial politik (Kiswanto, 2008:30).

Bagi kiai yang terjun dalam politik praktis, moralitas mutlak diperlukan agar tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri, golongan serta kepentingan politik sesaat dengan menghalalkan segala cara termasuk menjual dalil-dalil agama. Kiai tidak diperkenankan memakai jargon-jargon agama untuk memobilisasi masa demi tujuan politik sesaatnya. Setelah menjadi politisi para kiai harus benar-benar memperjuangkan hak rakyat yang selama ini tertindas oleh penguasa baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya serta memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat luhur dan mulia. Sebagai seorang pembimbing moral umat, kiai tidak boleh hanya bisa mengumandangkan dalil-dalil agama tanpa mampu melaksanakannya dalam berperilaku dan bertindak, yang paling dikhawatirkan, apabila para kiai hanya menggunakan dalil agama untuk menghasut, memecah-belah dan membodohi rakyat demi kepentingan politiknya.

Berkaitan dengan kata politik setidaknya dikenal dua istilah yaitu politik teoritis dan politik prakmatis. Dalam kamus ilmiah populer disebutkan

bahwa teoritis mempunyai arti: berdasarkan teori, berbeda dengan pengetahuan langsung. Sementara teori adalah: dalil, ajaran atau pemahaman tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal, patokan dasar atau garis-garis dasar sains dalam ilmu pengetahuan, pedoman praktik (Partanto, 2001:746). Dengan demikian politik teoritis adalah politik dengan berbagai definisinya dalam bentuk teori yang biasanya bersifat akademik dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Sedangkan praktis adalah: berdasarkan praktik, cocok, mudah, dan menyenangkan. Sementara praktik adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori dan pelaksanaan teori. Dengan demikian politik praktis dapat diartikan sebagai politik dengan berbagai definisinya yang dilaksanakan di lapangan berdasarkan apa yang terdapat dalam teori. Dalam tulisan ini yang disebut politik praktis adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan serta kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dilaksanakan di lapangan atau kehidupan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui tentang apa yang menjadi alasan para kiai masuk dalam ranah politik praktis. Terutama pada kiai yang masuk pada dunia politik praktis yang pada mulanya beliau menganggap bahwa politik itu kotor, politik penuh intrik dan tipu muslihat tapi pada akhirnya beliau ikut berpolitik. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah:

1. Kiai menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dan selalu menyanjung tentang kemenangan, apalagi dalam dunia politik terkenal prinsip “membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan”. Artinya, seorang politisi tidak bisa hanya berdiam diri. tanpa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan posisi politiknya. Seorang politisi diuntut untuk cerdik dan cerdas dalam memainkan intrik politik sehingga tidak akan terkalahkan oleh lawan. Kondisi yang demikian tentu saja berlawanan dengan karakter seorang kiai. Nilai-nilai moralitas dan kejujuran dan kejujuran yang menjadi ciri khas seorang kiai sangat tidak memungkinkan terlibat dalam dunia politik yang sarat dengan intrik. Bisa jadi, dunia politik bagi kiai sama halnya dengan masuk ke mulut singa yang akan meruntuhkan segala jati diri yang di sandang. Mungkinkah kiai berbohong, saling fitnah, saling jatuhkan-jatuhkan karena merebut jabatan politik?. Bagi seorang kiai perilaku tersebut tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi bagi seorang politisi perilaku tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi seorang politisi selalu mendewakan kemenangan, bisa jadi akan di capai dengan cara-cara yang baik atau kurang baik. Di sinilah intrik politik untuk selalu menang akan terus bekerja.
2. Kiai yang pada awalnya akrab dengan aksesori “sarung” sebagai simbol kesederhanaan dan religiositas, akhirnya beralih ke aksesori yang melambangkan kaum elitis yang jauh dari kesederhanaan masyarakat bawah. Bahkan, kopiah dan songkok yang menjadi identitas kultural kiai mulai hilang di telan oleh posisinya sebagai kaum birokrat. Melepas kopiah yang sebelumnya menjadi sesuatu yang tabu, karena bagi masyarakat tradisional telah mengakar dalam benak mereka bahwa memakai kopiah (tidak membuka kepala) merupakan bagian dari akhlak, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh para kiai.

3. Banyak kiai-kiai (politisi) yang pada awalnya sangat menjaga penampilan (minimal tetap dengan kopiah) sering kali tampil di depan publik dengan melepaskan identitasnya "kopiahnya". Tanpa disadari mereka telah mulai kehilangan identitas dan nilai-nilai kulturalnya. Sehingga sedikit demi sedikit akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kiai tersebut. Apalagi di tengah-tengah masyarakat, kiai notabene telah di posisikan sebagai figur suci, layaknya kertas putih yang sangat putih, apabila ia terkena setitik warna hitam akan menjadi noda yang sangat kentara.

Tipologi Kiai

Dalam banyak studi mengenai kiai, maka kiai dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kiai Langgar, yaitu kiai yang mengajar para santri di langgar atau di mushola kecil. Biasanya kiai ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi kiai ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar.
- b. Kiai Pesantren, yaitu kiai yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang kiai mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya.
- c. Kiai Mubaligh, yaitu kiai yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya kiai ini tidak memiliki pondok pesantren layaknya kiai pesantren lainnya.
- d. Kiai Politik, yaitu kiai yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembelajaran di madrasah dan pesantren.
- e. Kiai Madrasah, yaitu kiai yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah.

Endang Turmudi yang meneliti variasi ke-kiai-an di Jombang Jawa Timur mengklasifikasikan kiai kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pondok pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan di pondok pesantren. Disini kemudian terjalin hubungan kekerabatan antara kiai dan santri dan membuat lingkungan baru yaitu pondok pesantren. Santri merupakan aset terpenting bagi kehidupan pesantren karena akan sangat menentukan eksistensi pesantren itu sendiri. Disamping itu santri merupakan sumber jaringan antara pesantren yang satu dengan yang lain. Mereka yang menyelesaikan pendidikannya di pesantren dan kemudian menjadi kiai di kampung halamannya, maka mereka akan membangun jaringan antara pesantren yang dulu sebagai tempat belajarnya dengan para santri yang mereka kelola saat ini. Atau bahkan mereka ditunjuk sebagai pengganti kepemimpinan pesantren ketika sang kiai sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal dunia.
- b. Kiai Tarekat adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan-kegiatan membangun batin (dunia hati) umat islam. Kiai tarekat ini biasanya mempunyai lebih banyak pengikut dibandingkan dengan kiai pesantren. Karena tarekat merupakan lembaga formal, maka pengikutnya adalah anggota formal gerakan tarekat. Ada banyak

- macam gerakan tarekat yang
- c. ada di Indonesia, contohnya adalah *Terekat Qodiriyah wa Nahsabandiah* dan masih banyak lagi.
 - d. Kiai Politik lebih merupakan katagori campuran. Namun ia lebih *concern* dalam masalah politik praktis, baik terjun sebagai struktural maupun sebagai jurkam sebuah partai politik.
 - e. Kiai Panggung adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Biasanya pengikut kiai ini tersebar di beberapa daerah. Namun demikian tidak semua kiai panggung mempunyai banyak pengikut. Hal ini tergantung pada tingkat kepopuleran sang kiai tersebut dalam berdakwah. Dan biasanya kiai ini bersifat lokal, artinya kiai ini hanya terkenal di suatu daerah tertentu dimana kiai itu tinggal.

Dari kreteria kiai yang ditawarkan oleh Endang Turmudi diatas, agaknya kurang mewakili jika kita bandingkan dengan realita sekarang ini. Palsunya terkadang seorang kiai tidak hanya mempunyai satu kapasitas saja, terkadang lebih dari satu kapasitas. Mungkin kiai itu termasuk kiai pesantren namun dia juga sangat disegani dalam dunia politik. Ada juga kiai yang aktif dalam kegiatan dakwah dari kampung ke kampung, tetapi dia juga sebagai *Mursid* salah satu aliran tarekat. Bahkan terkadang ada satu kiai yang memiliki semua kreteria kiai seperti yang diatas. Artinya kiai itu pantas menyandang keempat kreteria kiai diatas. Disamping kiai tersebut memiliki pesantren, dia juga aktif dakwah keliling daerah, aktif dalam politik praktis dan juga dia sebagai *mursid* salah satu aliran tarekat.

Pengertian Politik

Kata politik awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *politic* yang berarti menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan (Salim, 1994:34). Secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent* (Echols,1981:437). Kata ini terambil dari kata latin yaitu *politicus* dan bahasa yunani yaitu *politico* yangberarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota. *Politic* kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama dari sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Menurut istilah, kata politik belum memiliki pengertian yang baku. Artinya masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli politik dalam mendefinisikannya, diantara tokoh yang telah mendefinisikan kata politik adalah:

- a. Deliar Noer seperti yang dikutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau -mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.
- b. Menurut Mariam Budiardjo yang juga di kutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.
- c. Dalam kamus Litre (1870) disebutkan bahwa "politik adalah suatu ilmu

- pemerintahan dan mengatur negara” (Shafiyah, 2003:18).
- d. Dalam kamus Robert (1962), “politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.”
 - e. Menurut Imam Syafi’i politik adalah “hal-hal yang sesuai dengan syara.
 - f. Menurut Ibnu Aqil “politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemashalatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasullullah. Ataupun dibawa oleh wahyu Allah.
 - g. Ibnu Qoyyim mendefinisikan “politik sebagai kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan meskipun Rasulallah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.
 - h. Imam Syahid Hasan al-Banna berpendapat bahwa "politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme terkontrol berperan besar”.

Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis

Kiai merupakan kata yang tidak asing lagi bagi baik dikalangan pondok pasantren, madrasah, maupun ditengah masyarakat pada umumnya. Kata kiai biasanya digunakan untuk sebutan bagi para *alim ulama* Islam (Purwodarmino, 1990:505).

Kata kiai ini juga digunakan untuk sebutan seorang tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama. Karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi dalam urusan agama, maupun dalam struktur masyarakat, khususnya di Indonesia. Dalam masyarakat Jawa pada khususnya, sosok kiai memperoleh pengakuan dan posisi yang sangat penting dalam masyarakat (Patoni, 2007:20). Kiai dianggap sebagai sosok yang luar biasa dan memiliki kekuatan “ajaib”.

Suatu peristiwa yang melibatkan kiai dalam sebuah partai politik tertentu yang dilakukan secara disengaja sehingga tercapai tujuan-tujuan tertentu. Perbuatan ini berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh seorang kiai yang memiliki tujuan tertentu dan bukan sebagai perilaku yang muncul secara kebetulan. Sehingga tindakan-tindakan kiai pesantren dalam keterlibatannya dalam politik praktis dapat digolongkan pada tindakan rasionalitas, instrumental, nilai-nilai rasionalitas tradisional dan rasionalitas efektif (Ummatin, 2002:32).

Kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama Islam yang mengajarkan beberapa kitab kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren. Sedangkan ustadz lebih dikenal sebagai badal atau wakil kiai dalam mengajarkan kitab kuning di pondok pesantren. Sedangkan politik praktis adalah segala aktivitas atau sikap yang

berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Maksud keterlibatan kiai dan dalam politik praktis yang disini adalah bentuk partisipasi kiai yang bersinggungan dengan negara melalui sebuah partai politik baik masuk sebagai struktural, maupun sebagai juru kampanye partai. Berpusat pada peranannya sebagai guru mengaji dan ahli agama, para kiai seringkali memainkan peran penting dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan politik (Dirdjosanjoto, 1999:187).

Peranan sosial, kiai sering dimintai pertolongan oleh masyarakat untuk memberikan perantara kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Peran dalam kemasyarakatan, kiai sering diundang dalam rapat-rapat baik lokal maupun nasional. Dalam bidang politik, sekarang ini banyak kiai yang terlibat dalam politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. Kiai langsung terlibat dalam politik, seperti menjadi pengurus partai politik, juru kampanye, ataupun sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, kiai hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun dukungan kepada calon baik legislatif maupun eksekutif.

Keterlibatan kiai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru lagi. Sejak lama peran serta kiai dalam politik sangat besar. Secara normatif keterlibatan kiai dalam politik mendapat dasar hukum yang kuat dari syari'at. Secara empiris, keterlibatan kiai sebagai tokoh politik telah dicontohkan oleh Rasullullah. Dasar normatif dan empiris inilah yang menjadi motivasi kiai berpolitik. Dalam sejarah Indonesia, sejak dahulu kiai sudah terlibat dalam masalah politik, baik dalam pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi ini, walaupun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda. Kiai mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pewarnaan politik di Indonesia.

Ada keterkaitan antara kiai pesantren, organisasi *Nahdlatul Ulama'* (NU), dan dunia politik. NU sebagai organisasi keagamaan yang sudah berdiri sejak tahun 1926, yang didirikan oleh para ulama' pesantren telah banyak memainkan peran penting dan sangat berpengaruh baik dunia politik maupun masyarakat Indonesia. Di antara pendiri organisasi tersebut adalah K.H Hasyim As'ari, dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Meskipun tujuan utama pendirian NU adalah untuk mengembangkan dan menegakkan paham *ahlus sunnah wal jama'ah*, NU terkadang juga dipergunakan sebagai alat perjuangan politik. Pada perkembangannya keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari, utamanya ketika bangsa Indonesia membutuhkan perjuangan NU. Posisi kiai yang merupakan pemimpin NU dan pemimpin pesantren, mau tidak mau "harus" terlibat dalam politik praktis (Turmudi, 2004:147).

Karena kiai memiliki "aset" yang tak ternilai harganya baik dilingkungan pesantren, NU, dan politik. "Aset" tersebut bisa berupa harisma, pengetahuan agama, para santri, dan para kaum tradisional yang mendukungnya. Kiai yang mempunyai pengaruh besar tersebut, (baik dilingkungan NU, pesantren, maupun masyarakat), memiliki kekuatan baru dalam pentas politik di Indonesia. Umumnya seorang kiai pesantren di samping memiliki massa dari pesantren, juga memiliki massa dari kalangan tradisional lainnya. Hal ini mempunyai nilai tersendiri bagi kalangan politisi. Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian memiliki posisi strategis dalam konstalasi politik. Pada era reformasi sekarang, banyak kiai yang terlibat dalam

politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Sejak beberapa tokoh NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), banyak kyai yang masuk kedalamnya baik melalui struktur maupun pendukung, meskipun masih banyak kyai yang masuk ke partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, PDI P, dan sebagainya. **Wujud Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis**

Keterlibatan para kyai dan ustadz dalam politik praktis sangat beraneka ragam. Beberapa wujud keterlibatan kyai dalam politik praktis adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan kyai sebagai pengurus struktural partai politik.
- b. Keterlibatan ini biasanya kyai dan ustadz secara langsung menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal, wilayah, maupun nasional.
- c. Keterlibatan kyai sebagai calon legislatif dan eksekutif.
- d. Seorang kyai dalam hal ini langsung mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon legislatif maupun eksekutif.
- e. Keterlibatan kyai sebagai dalam dukungan suara dan kampanye
- f. Wujud dukungan suara yang diberikan oleh kyai biasanya diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya kyai secara terbuka mendukung partai politik, calon legislatif, maupun eksekutif. Sedangkan secara tidak langsung, biasanya para politisi memohon sendiri kepada kyai dengan cara minta do'a restunya serta memilih partai politik, calon legislatif, maupun eksekutif yang mereka inginkan.

Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis.

Menurut Ahmad Patoni, alasan yang mempengaruhi seorang kyai terlibat dalam politik praktis, adalah:

- Alasan teologis.
Para kyai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak *sunni*. Dalam perspektif ini, hubungan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*) dalam tradisi *sunni* pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi.
- Alasan dakwah.
Dakwah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama, banyak metode yang dapat ditepuh. Salah satunya adalah lewat jalur politik. Banyak kyai yang berasumsi bahwa dengan lewat jalur politik ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka dan dapat berjalan dengan efektif.
- Alasan solidaritas politik
Hal inilah yang sulit dihindari sehingga menjadikan kyai pesantren mau tidak mau harus terjun kedalamnya.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan kyai dalam politik praktis menurut Khoiru Ummatin adalah:

- a. Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat.
- b. Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku- pelaku

- atau kelompok politik. Untuk mengejar kepentingan ini manusia harus memiliki kekuasaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran.
- c. Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan.
 - d. Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik.

Pro-Kontra Kiai Terjun Dalam Dunia Politik Praktis

Para kiai telah berani menyanggah predikat baru sebagai politisi. Euforia reformasi menurut Abdul A'la, telah mengobarkan kembali semangat politik kekuasaan pada sebagian tokoh NU yang selama orde baru tidak memiliki bahan bakar untuk menyulutnya (A'la, 2006:151). Para kiai sepertinya saling berlomba terjun ke politik praktis melalui partai politik yang beragam, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kiai tidak berkumpul dalam satu wadah partai politik tertentu, tetapi menyemut kedalam berbagai politik, terutama partai-partai politik yang berlatar belakang dengan simbol-simbol ke-kiai-an (PKB, PPP, PNU, PKNU).

Hampir di setiap partai politik, figur kiai menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dunia politik tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, bahkan seakan-akan telah menjadi sesuatu yang harus di rebut dan diraih. Kiai telah mendapatkan lahan garapan yang baru, setelah sebelumnya lebih banyak mengurus masalah pesantren dan masyarakat secara langsung, kini telah beralih mengurus dunia politik yang secara otomatis telah menyedot energi para kiai. Ada yang menyebut kiai telah pindah posisi dari mengurus pesantren dan masyarakat ke arah baru, yaitu mengurus kekuasaan atas nama rakyat. Bahkan muncul kesan kiai telah berubah secara drastis, yaitu dari kiai yang di kenal sederhana menjadi kiai yang tidak sederhana alias elitis dan bergelimang harta.

Jadi menurut saya, sosok kiai memang identik dengan kharisma yang tinggi di masyarakat. Kiai sebagai panutan masyarakat adalah simbol yang oleh Rasulullah dalam sebuah haditsnya ditegaskan bahwa kiai adalah pewaris para Nabi. Kiai merupakan penerus tugas para Nabi dan Rasul dalam hal menyampaikan ajaran agama. Maka taat dan patuh pada "jalan" kiai diartikan sama dengan tunduk pada Nabi. Peranan kiai di masyarakat tentu saja sangat vital. Mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Kiai dengan segala kelebihanannya serta betapa pun kecilnya lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi. Realitas ini sudah barang tentu memungkinkan kiai mempunyai peranan yang sangat besar di dalam masyarakat yang menjadi pengikutnya, baik di bidang keagamaan

dan bahkan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Keterlibatan para kiai (ulama) dengan politik praktis yang cukup jauh pada masa penjajahan adalah merupakan bukti sejarah yang riil. Misalnya mereka ikut bergerilya dengan bergabung ke dalam barisan *Hizbullah-Sabilillah* yang sebagian besar komandannya adalah para kiai. bahkan banyak pesantren yang menjadi markas barisan tersebut. Dan keterkaitan itu berlanjut hingga sekarang yang nampaknya semakin menjadi ancaman serius bagi peranan, posisi, sekaligus “fungsi” kiai yang mulai luntur seiring dengan berjubelnya kiai dalam pentas politik, terutama semenjak pemilihan anggota legislatif dan pilpres kemarin. Lebih-lebih euforia pilkada saat ini yang memungkinkan banyak tokoh agamawan lokal ikut serta memanfaatkan akses politik tersebut.

Parahnya, pergumulan itu ternyata berlanjut dengan membawa- bawa agama sebagai alat kekuasaan, landasan jaminan untuk “mengamankan suara” atau dijadikan sarana dalam perjuangan politik Fungsi dan peran utama kiai yang awalnya hanya melulu urusan agama dan kemaslahatan umat mulai terkikis drastis. Orientasi politik ternyata lebih menggiurkan dari pada sekadar berkuat di pondok-pondok pesantren. pengajian, majlis ta’lim. Di sini, nampak mulai terjadi semacam pertarungan sekaligus pertarungan otoritas dalam kancah politik dan birokrasi yang awalnya dipercayakan pada seorang *umaro’* (pemimpin). Bukan berarti catatan sejarah tidak pernah menarasikan eksistensi *umaro’* bukan dan kalangan ulama. Namun, wilayah etis yangdiagung- agungkan di antara keduanya menjadi semakin kabur. Tentu saja karena keduanya sesungguhnya mempunyai domain atau wilayah kerja dan “tentorial” yang sama sekali berbeda.

Sebagaimana yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya Tradisi Pesantren, sejak Islam menjadi agama resmi orang Jawa para penguasa harus berkompetisi dengan pembawa panji-panji Islam atau para kiai dalam bentuk hirarki kekuasaan yang lebih rumit. Sebab para kis yang sepanjang hidupnya memimpin aktivitas kehidupan keagamaan jugs telah memperoleh pengaruh politik. Dalam konteks yang sama, Soemarsaiti Moertono (1995) menyatakan bahwa perebutan pengaruh antara penguasa dan para kyai biasanya selalu dimenangkan oleh pihak penguasa. Namun Moertono juga menyatakan bahwa perebutan pengaruh tersebut tida' pernah padam dan tetap berlangsung sampai sekarang. Artinya para kis tetap memainkan peran politik yang sangat menentukan.

Kiai memang mempunyai banyak sisi kelebihan dibandingka^ kelompok-kelompok masyarakat lain. Dua keunggulan kiai yaitu keunggulan~ ilmu dan keunggulan amal, turut mendorong kiai dalam memperoleh kesempurnaan diri dan berusaha menyempurnakan martabat orang lain (*a-kamal wa al-takmil*). Legitimasi kepemimpinan seorang kiai secara langsung diperoleh dari masyarakat yang menilai tidak saja dari segi keahlian ilmu- ilmu agamanya, melainkan dinilai pula dari kewibawaan yang bersumbe* dari ilmu, kesaktian, sifat pribadi, dan seringkali keturunan.

Dengan mengesampingkan keunggulan tersebut, dalam pandangan~ penulis sendiri kiranya cukup dan bahkan sangat wajar masyarakat bersuar; lantang meminta para kyai untuk tidak terlalu ikut campur dalam proses politik. Tugas pokok kyai sebagaimana dalam hadits Rasulullah adalah kenabian, bukan kekuasaan politik (*innaha nubuwwah la mulk*). Kekhawatiran mereka sangat beralasan, sebab faktanya kiai hanya dijadikan tunggangan elit-elit yang

lebih paham perpolitikan demi meraih kekuasaan semata. Hampir semua calon kepala daerah yang berlatar belakang "kekiaian" tahu betul bahwa kondisi sosio-kultural masyarakat masih berpihak pada kharismatik sang kiai. Kiai dianggap dapat mendulang suara yang cukup besar untuk mendukung partainya atau ambisi untuk merebut kursi kekuasaan.

Kalaulah memang kiai harus berpolitik, setidaknya-tidaknya alangkah arif dan bijaksananya jikalau orientasi dan spirit dasar yang semestinya hendak dibangun memiliki sifat transformatif dan emansipatif untuk membina moral bangsa yang sudah demikian bobrok ini. Selain itu, kiai juga harus tegas bahwa keterlibatan mereka adalah upaya-upaya untuk memberi respon terhadap perubahan yang mengacu pada struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat yang paling pokok.

Berpolitik sudah sepatutnya diniati karena Tuhan semata, karena aktivitas politik hanyalah kendaraan yang akan menghantarkan menuju tujuan. Kekuasaan yang ada harus dijadikan alat untuk memperjuangkan misi pokok yaitu kesejahteraan masyarakat. Intinya, makna politik harus ditempatkan sebagai salah satu alat perjuangan (*wasail*) untuk mencapai tujuan (*maqashid*). Sekali lagi harus dipahami bahwa tugas pokok para kiai adalah penguatan (*empowerment*) *civil society* dan bukan terlalu jauh turut campur dalam urusan politik, karena dari situlah ditemukan pemahaman konsep dalam menemukan jati dirinya dan keberadaannya di masyarakat. Titel kiai adalah titel yang lahir dari masyarakat, bukan muncul ketika seorang kiai tersebut menerjuni arena perpolitikan. Maka, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itulah sebenarnya konsumsi utama seorang kiai. Apa yang menjadi keresahan dan kerisauan di masyarakat itulah sebenarnya "lahan garapan" utama kiai.

Jangan sampai yang terjadi justru keresahan dan kerisauan sang kiai sendiri karena tidak mampu meraih dukungan positif dari masyarakat. Karena rupanya sudah menjadi hukum sejarah, seorang kiai yang terjun dalam politik praktis, sedikit demi sedikit sosok kharismatik dan kewibawaannya akan pudar. Sebab masyarakat sudah lebih pintar ketika harus memilih dan melakukan apa yang menjadi hak pribadinya. Kiai tetap dihormati, tapi belum tentu juga akan dipatuhi ketika menggunakan daya pikatnya dalam mewujudkan ambisinya berpolitik. Sebab energi yang berputar di sepanjang jalur politik, saat ini nyatanya masih diyakini sebagai energi negatif, penuh intrik, saling memakan satu sama lain dan tentu saja tidak seiring-sejalan dengan harapan masyarakat atas diri seorang kiai.

Relasi Kiai dan Masyarakat

Keberadaan kiai tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Sebab masyarakat ialah medan, di mana kiai beramal dan berjuang menegakkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kiai dengan masyarakat ibarat gula dengan manis. Keterpautan keduanya tidak hanya dilandasi asas saling membutuhkan, tetapi kiai ibarat hati bagi tubuh masyarakat Eksistensi kiai begitu mengakar dalam benak dan kultur masyarakat bangsa ini. Keberadaannya disegani, dihormati, dan diagungkan karena memang kiai dan pesantrennya jelas-jelas punya peran dalam pembangunan masyarakat menuju *civil society* melebihi apa yang telah di lakukan oleh pemimpin struktural di tengah masyarakat.

Terdapat berbagai faktor penting yang menjadi dasar posisi kiai yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pertama, tingginya derajat

mobilitas kiai dalam membangun jaringan hubungan dengan komunitas di luarnya, baik sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan tertentu, sehingga memungkinkan mereka memperoleh informasi baru yang dimiliki santri dan masyarakat sekitar. Kedua, posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan di pesantren menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa, di mana orang-orang yang datang ke desa tidak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kiai. Ketiga, sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitar, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik.

Jadi menurut saya, di mata masyarakat kiai ialah sosok alim, bijaksana yang setiap perilaku, tutur kata dan pandangannya melahirkan kesejukan dan jalan terang bagi masyarakat. Legitimasi kiai kerap kali lebih berpengaruh dibanding penguasa semisal raja. Di samping faktor bahwa kiai diyakini sebagai orang yang lebih dekat dengan Tuhan, kiai juga dekat dengan masyarakat dalam keseharian hidup mereka.

Kiai zaman dulu tak jarang bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi jabatan ke-kiai-an tidak lantas menjadi profesi dan kebanyakan dari kiai tetap memiliki mata pencaharian sebagaimana layaknya masyarakat biasa. Interaksi sosial kiai dengan masyarakat karena itu juga dibangun melalui kesamaan profesi, seperti menjadi pedagang, petani dan semacamnya. Sementara itu pesantren disamping sebagai tempat penempatan, pendidikan, pembelajaran, ia juga merupakan pusat dari berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Dalam tiap perubahan generasi, kiai selalu menjadi aktor penting dari mobilitas sosial masyarakat, hal itu disebabkan oleh adanya keterikatan erat masyarakat dengan kiai. Kiai ialah *center figur* dan segala ucapnya adalah sabda bagi masyarakat yang harus didengar dan dipatuhi.

Dalam konteks ini, peran kiai akan sejalan dengan peran-peran sosial kerasulan. Sebagaimana di singgung di atas bahwa kiai ialah pewaris para nabi, karena itu pula tugas kiai tidak jauh berbeda dengan tugas kerasulan. Surat al-Jumu'ah ayat 2 menyiratkan sebuah tugas pencerahan bagi masyarakat yang dibebankan para rasul. Lebih lengkap ayat itu mengatakan: *“ Dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah. Sesungguhnya, mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”*. (QS: al-Jumu'ah (62): 2).

Oleh karena itu, kiai bukanlah gelar tanpa aksi dan pembuktian. tetapi memiliki nilai-nilai organis yang selalu bergerak. Gerakan dan aktivitas

kiai merupakan nafas kehidupan, terutama dalam mentransformasi nilai-nilai agama dan mengembangkan agama secara *kaffah*.

Di sinilah peran kiai dapat di terjemahkan dalam beberapa hal. Pertama, menyebarkan dan mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sebagaimana di ketahui bersama, pesantren merupakan salah satu pusat penyebaran ajaran dan nilai Islam. Kiai dalam hal ini menjadi pemimpin gerakan dakwah *bilhal* dan *bilqaul* dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran serta nilai-nilai Islam itu.

Kedua, melakukan kontrol dalam masyarakat. Kontrol kiai dapat berupa sebuah usaha penyadaran terhadap segala perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai Islam. Tidak seperti yang dibayangkan saat ini bahwa fungsi kontrol identik dengan tindakan represif dan sikap mencurigai, kiai melaksanakan fungsi kontrol dibarengi dengan teladan dan cara-cara yang arif serta bijaksana.

Ketiga, membantu memecahkan persoalan kemasyarakatan. Fungsi ini kerap kali muncul dominan, di mana kiai sebagai *problem solver* bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, yang kadang kala tidak hanya mencakup pada persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan bercocok tanam, rumah tangga dan sebagainya.

Keempat, menjadi agen perubahan sosial. Secara garis besar, tiga peran di atas mengalir dalam sebuah arus besar perubahan sosial. Tentunya perubahan yang dimaksud ialah perubahan pada yang lebih baik dalam segala dimensi kehidupan, terutama corak keagamaan. Fakta itu mungkin terjadi karena corak hubungan patronase kuat santri-masyarakat kepada kiai memungkinkan ia mengambil peran kepemimpinan bagi setiap mobilitas sosial yang terjadi (Tahqiq, 2004:189).

Politik Praktis Kiai Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat

Antara politik moral maupun praktis keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan atau mempengaruhi posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik (Sanit, 1998: 269). Yang membedakan keduanya ialah bahwa politik moral bertujuan menegakkan kebenaran posisi kekuasaan dan kebijaksanaan publik, sedangkan politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik, sementara politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan negara bagi diri atau kelompok pelaku politik itu sendiri. Itulah orientasi akhir dari proses politik praktis, menggapai kekuasaan merupakan suatu yang nyata di dalam pergumulan politik praktis.

Menurut saya dunia birokrasi atau kekuasaan bagi kiai pada hakikatnya hanyalah upaya menjauhkan diri dari *khittah* yang sebenarnya, yaitu sebagai pengayom masyarakat dan representasi dari kehidupan masyarakat bawah ke posisi baru sebagai pemegang kekuasaan dan penguasa yang bergelimang dengan kenikmatan.

Apalagi bagi para sementara kalangan, ada yang menyebut dunia politik adalah sederetan kursi empuk yang menyenangkan, sehingga tujuan politik yang salah satunya untuk merebut kursi, kedudukan dan posisi dalam pemerintahan, banyak orang, termasuk kiai yang menyukai (Ismail, 1999:138).

Peran kepemimpinan kultural yang sejak dahulu kala menjadi ciri khas kiai, terutama di Jawa secara otomatis telah mulai runtuh. Karena dengan terjun ke politik praktis, kiai telah menghancurkan idealisme kepemimpinan

kulturalnya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Lebih memprihatinkan lagi, keterlibatan kyai ke ranah politik memunculkan istilah politisasi pesantren yang tentu saja sangat merugikan dan layak digugat.

Orientasi politik yang berbeda, bisa menjadi faktor munculnya gap-gap politik di antara sesama kyai sehingga tidak bisa menafikan adanya upaya untuk saling jatuh-menjatuhkan. Antara satu kyai yang satu dengan yang lainnya akan saling kecam dan saling hantam. Inilah embrio awa lahirnya perseteruan baru di kalangan kyai. Hubungan di antara satu kyai dengan kyai yang lain akan mengalami puncak ketegangan yang akan berdampak terhadap eksistensi kyai dalam membangun kehidupan masyarakat dan pesantren. Antara kyai yang satu dengan kyai yang lain akan mengalami benturan yang dahsyat. Korbannya sudah jelas adalah masyarakat dan pesantren.

Di samping itu pesantren yang sejak dulu menjadi garda depan dan pusat pemberdayaan keilmuan, religiositas dan sosial (budaya dan ekonomi) masyarakat telah mengalami pergeseran paradigma ke arah yang kurang sevisi dengan eksistensi pesantren. Nuansa politis lebih kental menghinggapi kehidupan pesantren dan secara tidak langsung telah mengajarkan berpolitik terhadap para santri. Lebih memalukan lagi pesantren yang dulunya menjadi tempat berteduh masyarakat bawah (*acabis*), pada gilirannya tidak lagi terjadi.

Karena para politisi lebih aktif datang ke pesantren untuk *acabis* dengan membawa berbagai kepentingan politik mereka masing-masing, maka masyarakat yang pada awalnya sangat akrab dengan tradisi *acabis* kepada kyai, akhirnya menjadi enggan, karena kyai tidak lagi memiliki perhatian maksimal terhadap kepentingan mereka (masyarakat bawah). Apalagi setelah sang kyai duduk dalam struktur formal pemerintahan (legislatif dan eksekutif), kegiatan mereka sudah lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan formal mereka, sehingga hampir tidak memberikan waktu yang banyak untuk bertemu masyarakat.

Sementara antara kyai yang satu dengan yang lain, memiliki posisi yang sama di hati masyarakat, sehingga keberagaman pilihan politik para kyai dalam berbagai partai politik akan membuat masyarakat bingung, karena setiap kyai akan memberikan legitimasi yang meyakinkan untuk mendukung partai yang menjadi pilihan politiknya. Akibatnya pesantren yang di kelola oleh seorang kyai tertentu akan diklaim sebagai basis partai politik tertentu yang pada akhirnya akan menciptakan jarak yang akan sangat kentara dengan masyarakat yang tidak sehaluan. Masyarakat menjadi terkotak-kotak akibat perbedaan aliran politik para kyai. Hal ini secara otomatis akan membuka ruang lebar terciptanya perpecahan di kalangan masyarakat (umat). Kyai pada gilirannya akan menjadi api penyulut perpecahan di kalangan masyarakat akibat perbedaan politik kyai. Apalagi dalam dunia politik sudah masyhur dengan jargon " *tidak ada teman atau lawan abadi dalam politik, melainkan kepentingan*".

Keterlibatan kyai dalam dunia politik praktis telah mengaburkan identitasnya sebagai tokoh independen. Implikasinya, kebijakan yang dihasilkan tidak akan pernah populis dan cenderung memihak. Maka dengan kebijakan yang berpihak itu, sesuai dengan permainan politik, mengakibatkan kyai tidak lagi dianggap sebagai panutan umat, tetapi politisi yang sangat memungkinkan merangkap sebagai preman.

Konsekuensi politik praktis kyai semacam ini menjadi tantangan sekaligus ancaman terhadap masa depan bagi eksistensi kyai dan pesantren

yang dikelolanya, karena secara faktual posisi pesantren dalam alam bawah sadar masyarakat teryakini sebagai basis dan sumber kebenaran. Maka aksi politik praktis kiai pesantren juga akan mewarnai terhadap kewibawaan kiai dan pesantrennya, minimal di mata masyarakat yang afiliasi politiknya terhadap figur kiai yang berbeda.

Kiai yang pada awalnya sangat dihormati dan disanjung, kini dihujat habis-habisan, akibat perbedaan politik dan perilakunya yang menjengkelkan. Mampukah kiai menjadi sosok yang “tebal muka” dalam menghadapi caci maki yang dimungkinkan akan terus berlanjut selama kiai masih membiarkan syahwat politiknya bergelora? Jawabannya tentu ada pada para kiai: selama kiai masih menomorduakan masyarakat dan pesantren serta belum menyadari akan peran kerakyatannya yang substansial maka selama itu pula kiai akan menjadi kecaman dan *rasanan jelek* masyarakatnya sendiri.

Kiai tidak lagi di anggap sebagai tokoh dan panutan yang layak dihargai dan dihormati. Di mata masyarakat, kiai yang terjun ke politik praktis dan berhasil meraih jabatan politis, baik di eksekutif maupun legislatif di anggap telah mulai meninggalkan kepentingan masyarakat dan jauh dengan kehidupan masyarakat sehingga dianggap telah meninggalkan *khittah* ke- kiai-annya.

Di mata masyarakat keterlibatan kiai dalam politik kekuasaan cenderung di terjemahkan sebagai salah satu bentuk kecintaan kiai pada kekuasaan sehingga menafikan citra kesucian dirinya sendiri. Masyarakat yang pada awalnya sangat mengagumi dan menghormati kiai, berubah haluan mengambil jarak dengan kiai yang bersangkutan. Selain karena telah dianggap tidak lagi mencerminkan citra pengayom masyarakat, ia juga telah dianggap terjebak dengan kepentingan duniawi. Masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai sosok yang berwibawa sehingga setiap kata- katanya tidak lagi dianggap sebagai petuah suci lantaran telah bercampur dengan nafsu duniawi. Politik praktis pada dasarnya menjadi bumerang bagi eksistensi kiai di tengah-tengah masyarakat karena ia identik dengan jabatan dan harta.

Kesimpulan

Bukan rahasia lagi, setelah reformasi bergulir tidak sedikit kiai yang tadinya hidup bertapa, khusyuk, damai dan tenteram dalam pondok pesantren menjadi sebuah haluan, menyebrangi dunia baru yang bernama politik praktis. Beberapa wujud keterlibatan kiai dalam politik praktis adalah sebagai berikut: keterlibatan kiai sebagai pengurus struktural partai politik, keterlibatan kiai sebagai calon legislatif dan eksekutif, keterlibatan kiai sebagai dalam bentuk dukungan suara dan kampanye.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis adalah:

- a) Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat.
- b) Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
- c) Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan.
- d) Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik.

Pilihan ke politik praktis oleh para kiai sama halnya dengan menelanjangi dirinya sendiri di mata masyarakat. Tidak ada lagi kewibawaan dan kharisma yang terpancar dari sosok kiai, karena "pragmatisme" (jabatan politik) telah menjauhkannya dari identitas yang *genuine*, yaitu sebagai sosok dan figur yang bisa menjadi teladan dan pengayom masyarakat dalam semua lapisan. Kiai tidak lagi dianggap sebagai figur terhormat dan penuh wibawa. Tetapi sebaliknya, kiai dianggap sebagai sosok yang mudah diperjual-belikan. Jabatan politik yang disandangnya malah semakin membuat masyarakat berani menentang dan mengecam kiai. Nilai-nilai kesakralan yang sangat kental pada sosok kiai tiba-tiba meluntur setelah ia menjabat dalam struktur pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abdul. 2006. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Bonawi, Imam. 1993. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam: Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. 1999. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Di Jawa*, Jogjakarta: LKiS.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Echols, M.1981. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Ismail, Faizal. 1999. *Nil, Gusdurisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kiswanto, Heri. 2008. *Gagalnya Peranan Politik Kiai Dalam Mengatasi Krisis Multi Dimensional*. Yogyakarta: Nawasae Press.
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi Sistem Tradisional Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Partanto, Pius. 2001. *Kamus Ilmiah Modern*. Surabaya: Arkola.
- Patoni, Achmad.2007. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwodarmino.1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Abdul Mu'in.1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Shafiyah, Amatullah. 2003. *Kiprah Politik Muslimah*, Jakarta: Gema Insani.
- Sutarto, Ayu. 2008. *Menjadi NU menjadi Indonesia*. Surabaya: Khalista.
- Tahqiq, Nanang. 2004. *Politik Islam*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Ummatin, Khoiru.2002. *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.